

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
a. Tinjauan Umum terhadap Badan Hukum	23
b. Tinjauan Umum terhadap Peraturan Menteri	26
c. Tinjauan Umum terhadap Hukum Pengawasan	26
d. Tinjauan Umum terhadap Koperasi	32
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
a. Sifat Penelitian	42
b. Jenis Penelitian	42
c. Bahan Penelitian	43
d. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	44
e. Subyek Penelitian	45
f. Analisis Data	45
BAB IV	47
PEMBAHASAN	47
A. Hukum Pengawasan Koperasi Saat Ini dalam Upaya Pencegahan Praktik Ilegal Koperasi	47

a.	Praktik Ilegal dalam Perkoperasian	47
b.	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengawasan Koperasi	48
c.	Problematika dalam Hukum Pengawasan Koperasi pada masa ini	56
i.	Pembinaan Koperasi	56
ii.	Pemberian pinjaman pada bukan anggota/calon anggota	58
iii.	Cakupan tugas pengawas koperasi	60
iv.	Pengurus yang lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah	63
v.	Pengawasan terhadap koperasi yang belum atau tidak mempunyai unit simpan pinjam	67
vi.	Pengawas Koperasi juga berpotensi melakukan pelanggaran	70
vii.	Wewenang Pengawasan Koperasi	70
viii.	Peran OJK dalam pengawasan koperasi	73
ix.	Terkait Pengawasan yang wajib dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi	74
x.	Pembentukan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dan Satgas Pengawasan Koperasi (Tim Satgas Koperasi)	76
xi.	Pengawasan Koperasi secara digital	79
xii.	Batasan-batasan pada Koperasi	81
B.	Implementasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan Koperasi di Indonesia saat ini	85
a.	Dari sisi Koperasi	85
i.	Koperasi Simpan Pinjam Tamanmartani Sejahtera	85
ii.	Koperasi KSU Swaloka	89
iii.	Koperasi Konsumen Kopma UGM	93
iv.	Koperasi Simpan Pinjam BKM Sinduadi	87
v.	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kokelgam UGM (KPRI Kokelgam UGM)	94
b.	Dari sisi Pemerintah	98
c.	Pelajaran Penting yang dapat diambil terkait Hukum Pengawasan Koperasi beserta implementasinya di Indonesia saat ini	102
BAB V		105
A.	KESIMPULAN	105
B.	SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA		107